



BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA,
DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH,
SERTA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA
MELALUI PROGRAM DESA MAJU INDRAGIRI HILIR JAYA
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan di setiap desa di Kabupaten Indragiri Hilir melalui Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya, perlu menetapkan tata cara pembagian Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, serta Bantuan Keuangan kepada Desa;
b. bahwa Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, serta Bantuan Keuangan kepada Desa untuk setiap Desa merupakan salah satu sumber pendapatan Desa;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2015 tentang Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya, tata cara pembagian ADD, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Kepada Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Tata Cara Pembagian Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, serta Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Setiap Desa Melalui Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Tahun Anggaran 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 13);
11. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 Nomor 7);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2015 tentang Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2015 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA, DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH, SERTA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA MELALUI PROGRAM DESA MAJU INDRAGIRI HILIR JAYA TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Indragiri Hilir.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah Alokasi Dana Desa yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten yang bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten yang dibagikan ke Desa melalui APB Desa.

13. Desa Maju Indragiri Hilir Jaya, selanjutnya disingkat DMIJ, adalah program pemerintah kabupaten melalui pendekatan pemberdayaan dengan mengefektifkan fungsi pemerintahan desa, kelembagaan desa dan masyarakat desa untuk merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan pengawasan pembangunan secara partisipatif.
14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
15. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa
17. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
18. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan.
19. Pendamping adalah orang yang menjalin relasi sosial dengan masyarakat dalam rangka memperkuat dukungan, memotivasi, memfasilitasi dan menjembatani kebutuhan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di desa.
20. Pendampingan adalah suatu proses menjalin relasi sosial antara pendamping dengan dampingannya dalam suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif di desa.
21. Fasilitator Kabupaten selanjutnya disingkat Faskab adalah tenaga profesional yang berperan sebagai supervisor atas pelaksanaan kegiatan tahapan dan pengelolaan dana Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya di Kabupaten Indragiri Hilir.
22. Fasilitator Masyarakat adalah Fasilitator Tingkat Kecamatan dan tugasnya untuk memfasilitasi masyarakat dalam setiap tahapan Program Desa Maju Indrgiri Hilir Jaya pada tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian, selain itu juga berperan dalam membimbing Pendamping Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat atau pelaku-pelaku Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya di desa dan kecamatan.
23. Pendamping Desa adalah Fasilitator Tingkat Desa dan tugasnya adalah untuk memfasilitasi masyarakat dalam setiap tahapan Program Desa Maju Indrgiri Hilir Jaya pada tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian.
24. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II AZAS

Pasal 2

- (1) ADD dikelola berdasarkan azas tertib, taat pada peraturan perundangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingkan masyarakat setempat.
- (2) ADD sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 bersumber dari APBD dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara adil dan proporsional.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, serta Bantuan Keuangan Kepada Desa, dialokasikan Pemerintah Daerah untuk Desa.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan angka nominal yang diterima masing-masing Desa.
- (3) ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, serta Bantuan Keuangan Kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Kabupaten disalurkan melalui Program DMIJ.

BAB IV PENGALOKASIAN DANA KE SETIAP DESA

Bagian Kesatu Pengalokasian ADD ke Setiap Desa

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan jumlah ADD.
- (2) Besaran ADD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mempertimbangkan jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, kesulitan geografis, evaluasi kinerja pelaksanaan Kegiatan APB Desa serta evaluasi kinerja Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa.
- (3) Jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, kesulitan geografis, evaluasi kinerja pelaksanaan Kegiatan APB Desa serta evaluasi kinerja Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) merupakan indikator alokasi dana melalui Program DMIJ yang dihitung dengan bobot:
 - a. 15% (lima belas perseratus) untuk jumlah penduduk Desa;
 - b. 15 % (lima belas perseratus) untuk angka kemiskinan Desa;
 - c. 10 % (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah Desa;
 - d. 10% (sepuluh perseratus) untuk kesulitan geografis;
 - e. 25%(dua puluh lima perseratus) untuk penilaian kinerja Kegiatan APB Desa; dan
 - f. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk penilaian kinerja Pemerintahan Desa kelembagaan Desa.
- (4) Data jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten.
- (5) Evaluasi penilaian kinerja Desa terhadap pelaksanaan Kegiatan APB Desa sebagaimana yang dimaksud ayat (3) huruf e dibuat dan dilakukan oleh Tim Penilai yang dibentuk oleh Kepala DPMD.

- (6) Evaluasi penilaian kinerja Desa pada item kinerja kelembagaan Desa dan Pemerintahan Desa sebagaimana yang dimaksud ayat (3) huruf f dilakukan oleh Tim Penilai yang dibentuk oleh Kepala DPMD.
- (7) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) untuk masing-masing Desa bersifat mengikat dan tidak dapat diganggu gugat.

Bagian Kedua
Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
ke Setiap Desa

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan jumlah alokasi dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Pengalokasian dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke masing-masing desa dengan cara:
 - a. 60 % (enam puluh per seratus) di bagi rata kepada setiap desa; dan
 - b. 40 % (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional sesuai realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari masing-masing desa.

Pasal 6

Dalam hal tidak tersedianya data realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah dari masing-masing desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf b, maka pemerintah daerah dapat menghitung alokasi dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah untuk masing-masing desa dengan cara membagi rata jumlah alokasi dana dengan jumlah desa.

Bagian Ketiga
Pengalokasian Dana Bantuan Keuangan kepada Desa
ke Setiap Desa

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan jumlah alokasi dana Bantuan Keuangan kepada Desa.
- (2) Besarnya alokasi Bantuan Keuangan kepada Desa ke masing-masing desa menyesuaikan dengan tipologi desa dan penilaian kinerja desa.
- (3) Alokasi Bantuan Keuangan kepada Desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB V
PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, serta Bantuan Keuangan Kepada Desa disalurkan melalui Program DMIJ oleh Pemerintah Daerah kepada Desa.
- (2) Penyaluran dana sebagaimana yang dimaksud pada ayat(1) dilakukan dengan cara pemindah buku dari RKUD ke rekening Desa.
- (3) Rekening Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan rekening giro Desa yang ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Pasal 9

- (1) Penyaluran dana sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 8 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling lambat pada bulan Juli sebesar 60% (enam puluh per seratus);
 - b. Tahap II paling lambat pada bulan Oktober sebesar 40% (empat puluh per seratus);
- (2) Penyaluran dana setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada minggu kedua.
- (3) Penyaluran dana setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di kas daerah.

Pasal 10

- (1) Penyaluran ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, serta Bantuan Keuangan Kepada Desa, melalui Program DMIJ dilakukan setelah APBD disahkan.
- (2) Penyaluran ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, serta Bantuan Keuangan Kepada Desa melalui Program DMIJ dari RKUD ke rekening kas Desa dilakukan setelah APB Desa disahkan.
- (3) Dalam hal APBD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, penyaluran dana melalui Program DMIJ dapat dilakukan setelah diterbitkannya Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan Kepada Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah melalui Program DMIJ ditetapkan.

BAB VI PENGGUNAAN

Pasal 11

- (1) Alokasi Dana yang diterima Desa melalui Program DMIJ digunakan untuk membiayai :
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - e. Tak Terduga.
- (2) Alokasi Dana yang diterima Desa yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten tidak dibenarkan teranggarkan ganda.
- (3) Untuk menghindari pembiayaan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Alokasi Dana yang diterima dituangkan dalam satu dokumen perencanaan di Desa, yaitu APB Desa.
- (4) Untuk mempermudah proses pemantauan, pemeriksaan dan audit, maka sumber biaya dan kegiatan yang dibiayai harus jelas dalam APB Desa.

Pasal 12

- (1) Penggunaan dana melalui Program DMIJ mengacu pada RPJM Desa, RKP Desa yang tertuang dalam dokumen APB Desa.
- (2) Dokumen APB Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disahkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melalui proses evaluasi oleh Tim Evaluasi Produk Hukum Desa yang dibentuk oleh Bupati.

- (4) Penggunaan dana melalui Program DMIJ sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dalam proses penyusunan dokumen Rencana Anggaran Biaya dan Desain Teknis sebagai rincian APB Desa, dapat didampingi oleh Pendamping Desa, Fasilitator Masyarakat dan dapat dibantu oleh Faskab.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana kepada Bupati setiap semester melalui camat.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti format yang diatur pada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- (3) Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana melalui Program DMIJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Semester I paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Semester II paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Kepala Desa terlambat atau tidak menyampaikan laporan sebagaimana yang dimaksud Pasal 13 ayat (3) huruf a, Bupati dapat menunda penyaluran dana melalui Program DMIJ sampai dengan disampaikannya laporan penggunaan dana.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana yang dimaksud Pasal 13 ayat (3) huruf b sampai dengan tanggal 30 bulan Juni tahun anggaran berikutnya, maka Bupati dapat memberikan sanksi administrasi berupa pemotongan alokasi dana melalui Program DMIJ yang bersangkutan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Pemotongan alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (4) Pemotongan Dana melalui Program DMIJ sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) atas sanksi yang diberikan kepada Desa dapat dipergunakan dan/atau dialokasikan ke desa-desa lain yang berprestasi.
- (5) Penetapan Desa yang menerima alokasi dana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VIII PENDAMPINGAN

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan proses perencanaan pembangunan desa dapat dilakukan pendampingan.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari Pendamping Desa, Fasilitator Masyarakat dan Faskab.
- (3) Tugas pokok dan fungsi Pendampingan diatur pada Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Operasional Program DMIJ.

BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran dan penggunaan dana yang masuk ke Desa.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Penerbitan Peraturan Desa tentang APB Desa beserta besaran dananya;
 - b. Penyaluran dana Desa dari RKUD ke rekening kas Desa;
 - c. Realisasi penggunaan dana;
 - d. Penyampaian laporan realisasi;
 - e. SiLPA.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan dana dan Program DMIJ.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terdapat SiLPA dana DMIJ secara tidak wajar, Bupati dapat memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan dana Desa sebesar SiLPA.
- (2) SiLPA dana Program DMIJ secara tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena penggunaan dana tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana DMIJ, pedoman umum dan pedoman teknis kegiatan.
- (3) Dalam hal terjadi pemberian sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), alokasi dana hasil pengurangan tersebut dapat diberikan kepada desa yang berprestasi dalam menjalankan kegiatan Alokasi Dana DMIJ tahun lalu.
- (4) Desa berprestasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah dilakukan evaluasi oleh Pemerintah Daerah melalui DPMD.
- (5) Evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana melalui Program DMIJ sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Pembentukan Tim Evaluasi;
 - b. Penetapan Indikator Penilaian; dan
 - c. Menetapkan Hasil Penilaian.
- (6) Pembentukan Tim Evaluasi dan penetapan Indikator Penilaian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diketuai oleh Kepala DPMD.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Besaran Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Bantuan Keuangan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 7 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

→ 3

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 8 Mei 2017
BUPATI INDRAGIRI HILIR, *se*

319

H. MUHAMMAD WARDAN

Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal 8 Mei 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Reiss
H. SAID SYARIFUDDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2017 NOMOR 14

LAMPIRAN :

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR

NOMOR : 14 TAHUN 2017

TENTANG TATACARA PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA, DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

MELALUI PROGRAM DESA MAJU INDRAGIRI HILIR JAYA

TAHUN ANGGARAN 2017

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dana Desa			Pajak dan Retribusi		Total Keseluruhan
			Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa	Pajak	Retribusi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	RETEH	SANGLAR	306,920,228	464,067,705.45	770,988,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	795,411,000
2	RETEH	PULAU KECIL	306,920,228	459,850,584.15	766,771,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	791,194,000
3	RETEH	SUNGAI TERAP	306,920,228	246,628,595.21	553,549,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	577,972,000
4	RETEH	SUNGAI UNDAN	306,920,228	297,273,480.49	604,194,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	628,617,000
5	RETEH	SEBERANG SANGLAR	306,920,228	305,939,210.71	612,859,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	637,282,000
6	RETEH	MEKAR SARI	306,920,228	262,960,966.94	569,881,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	594,304,000
7	RETEH	SEBERANG PULAU KLIANG	306,920,228	217,909,173.31	524,829,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	549,252,000
8	RETEH	SUNGAI ASAM	306,920,228	296,017,777.48	602,938,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	627,361,000
9	RETEH	PULAU RUKU	306,920,228	283,593,322.64	590,514,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	614,937,000
10	RETEH	TANJUNG LABUH	306,920,228	202,273,743.11	509,194,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	533,617,000
11	RETEH	SUNGAI MAHANG	306,920,228	194,628,885.90	501,549,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	525,972,000
12	ENOK	PENGALEHAN	306,920,228	337,653,484.82	644,574,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	668,997,000
13	ENOK	SUNGAI AMBAT	306,920,228	278,932,081.51	585,852,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	610,275,000
14	ENOK	SIMPANG TIGA	306,920,228	289,562,160.12	596,482,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	620,905,000
15	ENOK	RANTAU PANJANG	306,920,228	371,049,643.48	677,970,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	702,393,000
16	ENOK	SUNGAI RUKAM	306,920,228	405,896,373.07	712,817,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	737,240,000
17	ENOK	BAGAN JAYA	306,920,228	413,023,765.38	719,944,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	744,367,000
18	ENOK	SUHADA	306,920,228	357,269,279.02	664,190,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	688,613,000
19	ENOK	JAYA BAKTI	306,920,228	327,976,172.11	634,896,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	659,319,000
20	ENOK	SUNGAI LOKAN	306,920,228	232,133,820.15	539,054,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	563,477,000
21	ENOK	SIMPANG TIGA DARATAN	306,920,228	315,320,187.15	622,240,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	646,663,000
22	KUALA INDRAGIRI	SUNGAI BULUH	306,920,228	296,005,306.43	602,926,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	627,349,000
23	KUALA INDRAGIRI	TANJUNG LAJAU	306,920,228	324,747,655.07	631,668,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	656,091,000
24	KUALA INDRAGIRI	SUNGAI BELA	306,920,228	452,193,542.27	759,114,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	783,537,000
25	KUALA INDRAGIRI	TELUK DALAM	306,920,228	340,498,787.53	647,419,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	671,842,000
26	KUALA INDRAGIRI	SUNGAI PIYAI	306,920,228	255,698,363.81	562,619,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	587,042,000
27	KUALA INDRAGIRI	PERIGI RAJA	306,920,228	270,590,431.09	577,511,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	601,934,000
28	KUALA INDRAGIRI	TANJUNG MELAYU	306,920,228	257,966,738.10	564,887,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	589,310,000
29	TEMPULING	TELUK KIAMBANG	306,920,228	390,066,626.12	696,987,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	721,410,000
30	TEMPULING	MUMPA	306,920,228	317,782,163.20	624,702,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	649,125,000
31	TEMPULING	TELUK JIRA	306,920,228	326,753,066.77	633,673,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	658,096,000
32	TEMPULING	KARYA TUNAS JAYA	306,920,228	314,124,265.51	621,044,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	645,467,000
33	TEMPULING	HARAPAN JAYA	306,920,228	331,931,814.30	638,852,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	663,275,000
34	GAUNG ANAK SERKA	KUALA GAUNG	306,920,228	368,638,035.94	675,558,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	699,981,000
35	GAUNG ANAK SERKA	TELUK PANTAIAN	306,920,228	308,854,792.78	615,775,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	640,198,000
36	GAUNG ANAK SERKA	TELUK SUNGKA	306,920,228	317,287,620.20	624,208,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	648,631,000
37	GAUNG ANAK SERKA	SUNGAI ILIRAN	306,920,228	274,589,061.02	581,509,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	605,932,000
38	GAUNG ANAK SERKA	TELUKTUASAN	306,920,228	220,432,396.17	527,353,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	551,776,000
39	GAUNG ANAK SERKA	RAMBAIAN	306,920,228	288,396,637.50	595,317,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	619,740,000
40	GAUNG ANAK SERKA	HARAPAN MAKMUR	306,920,228	234,610,212.26	541,530,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	565,953,000
41	GAUNG ANAK SERKA	KELUMPANG	306,920,228	231,656,189.12	538,576,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	562,999,000
42	GAUNG ANAK SERKA	IDAMAN	306,920,228	256,276,394.61	563,197,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	587,620,000
43	MANDAH	PULAU CAWAN	306,920,228	450,627,861.27	757,548,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	781,971,000
44	MANDAH	BELARAS	306,920,228	287,609,050.16	594,529,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	618,952,000
45	MANDAH	BENTE	306,920,228	541,981,714.31	848,902,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	873,325,000
46	MANDAH	IGAL	306,920,228	499,901,719.52	806,822,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	831,245,000
47	MANDAH	PELANDUK	306,920,228	351,771,465.45	658,692,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	683,115,000
48	MANDAH	BAKAU ACEH	306,920,228	792,707,326.48	1,099,618,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	1,124,032,296
49	MANDAH	BATANG TUMU	306,920,228	351,987,935.15	658,908,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	683,331,000
50	MANDAH	BEKAWAN	306,920,228	293,034,539.55	599,955,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	624,378,000
51	MANDAH	BANTAYAN	306,920,228	389,897,462.15	696,818,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	721,241,000
52	MANDAH	BATANG SARI	306,920,228	253,687,690.29	560,608,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	585,031,000
53	MANDAH	BOLAK RAYA	306,920,228	331,448,536.65	638,369,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	662,792,000
54	MANDAH	CAHAYA BARU	306,920,228	229,007,715.98	535,928,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	560,351,000
55	MANDAH	BELARAS BARAT	306,920,228	202,062,052.39	508,982,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	533,405,000
56	MANDAH	SEPAKAT JAYA	306,920,228	264,936,390.89	571,857,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	586,280,000
57	MANDAH	SURAYA MANDIRI	306,920,228	241,256,654.88	548,177,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	572,600,000
58	MANDAH	BIOARI TANJUNG DATUK	306,920,228	249,780,126.84	556,700,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	581,123,000
59	KATEMAN	KUALA SELAT	306,920,228	332,913,362.74	639,834,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	664,257,000
60	KATEMAN	SUNGAI SIMBAR	306,920,228	247,238,850.67	554,159,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	578,582,000
61	KATEMAN	PENJURU	306,920,228	317,110,343.17	624,031,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	648,454,000
62	KATEMAN	SARI MULIA	306,920,228	294,575,262.81	601,495,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	625,918,000
63	KATEMAN	AIR TAWAR	306,920,228	467,856,178.83	774,776,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	799,199,000
64	KATEMAN	TANJUNGRAJA	306,920,228	406,159,136.91	713,079,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	737,502,000
65	KATEMAN	SUNGAI TERITIP	306,920,228	311,227,008.99	618,147,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	642,570,000
66	KATEMAN	MAKMUR JAYA	306,920,228	228,417,594.83	535,338,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	559,761,000
67	KERITANG	PEBENAAN	306,920,228	418,578,397.94	725,499,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	749,922,000
68	KERITANG	SEBERANG PEBENAAN	306,920,228	334,520,469.96	641,441,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	665,864,000
69	KERITANG	NUSANTARA JAYA	306,920,228	358,886,416.79	665,807,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	690,230,000
70	KERITANG	KOTA BARU SEBERIDA	306,920,228	440,501,201.77	747,421,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	771,844,000
71	KERITANG	KEMBANG MEKAR SARI	306,920,228	337,451,450.56	644,372,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	668,795,000
72	KERITANG	PASAR KEMBANG	306,920,228	345,798,229.04	652,718,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	677,141,000
73	KERITANG	KUALA KERITANG	306,920,228	347,853,470.53	654,774,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	679,197,000

→ 9

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dana Desa			Pajak dan Retribusi		Total Keseluruhan
			Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa	Pajak	Retribusi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	KERITANG	KUALA LEMANG	306,920,228	286,021,918.50	592,942,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	617,365,000
75	KERITANG	TELUK KELASA	306,920,228	268,233,964.97	575,154,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	599,577,000
76	KERITANG	PENGALEHAN	306,920,228	428,372,342.41	735,293,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	759,716,000
77	KERITANG	PANCUR	306,920,228	270,806,576.16	577,727,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	602,150,000
78	KERITANG	SENICALANG	306,920,228	302,958,857.18	609,879,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	634,302,000
79	KERITANG	PETALONGAN	306,920,228	285,349,044.11	592,269,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	616,692,000
80	KERITANG	NYIUR PERMAI	306,920,228	258,991,758.11	565,912,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	590,335,000
81	KERITANG	LINTAS UTARA	306,920,228	248,606,274.77	555,527,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	579,950,000
82	KERITANG	KAYU RAJA	306,920,228	265,840,893.15	572,761,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	597,184,000
83	TANAH MERAH	SELAT NAMA	306,920,228	236,119,602.92	543,040,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	567,463,000
84	TANAH MERAH	SUNGAI NYIUR	306,920,228	333,508,877.10	640,429,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	664,852,000
85	TANAH MERAH	TANJUNG BARU	306,920,228	295,494,004.05	602,414,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	626,837,000
86	TANAH MERAH	TEKULAI HILIR	306,920,228	302,618,772.01	609,539,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	633,962,000
87	TANAH MERAH	TEKULAI HULU	306,920,228	216,320,287.78	523,241,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	547,664,000
88	TANAH MERAH	TEKULAI BUGIS	306,920,228	273,615,069.64	580,535,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	604,958,000
89	TANAH MERAH	TANJUNG PASIR	306,920,228	363,203,444.49	670,124,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	684,547,000
90	TANAH MERAH	TANAH MERAH	306,920,228	781,873,645.04	1,088,794,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	1,113,217,000
91	TANAH MERAH	SUNGAI LAUT	306,920,228	292,964,017.29	599,884,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	624,307,000
92	BATANG TUAKA	SUNGAI LUAR	306,920,228	369,024,680.36	675,945,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	700,368,000
93	BATANG TUAKA	SUNGAI DUSUN	306,920,228	265,487,107.76	572,407,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	596,830,000
94	BATANG TUAKA	SUNGAI JUNJANGAN	306,920,228	397,739,276.58	704,660,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	729,083,000
95	BATANG TUAKA	SUNGAI RAYA	306,920,228	276,626,988.60	583,547,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	607,970,000
96	BATANG TUAKA	KUALA SEBATU	306,920,228	481,969,522.54	788,890,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	813,313,000
97	BATANG TUAKA	TANJUNG SIANTAR	306,920,228	243,161,341.62	550,082,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	574,505,000
98	BATANG TUAKA	SUNGAI RAWA	306,920,228	350,515,705.39	657,436,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	681,859,000
99	BATANG TUAKA	SIALANG JAYA	306,920,228	318,420,741.77	625,341,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	649,764,000
100	BATANG TUAKA	GEMILANG JAYA	306,920,228	250,198,142.46	557,118,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	581,541,000
101	BATANG TUAKA	TASIK RAYA	306,920,228	280,520,686.55	587,441,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	611,864,000
102	BATANG TUAKA	PASIR EMAS	306,920,228	234,475,915.64	541,396,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	565,819,000
103	BATANG TUAKA	SIMPANG JAYA	306,920,228	257,172,363.16	564,093,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	588,516,000
104	GAUNG	TERUSAN KEMPAS	306,920,228	340,391,271.94	647,312,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	671,735,000
105	GAUNG	LAHANG BARU	306,920,228	410,619,414.22	717,540,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	741,963,000
106	GAUNG	SIMPANG GAUNG	306,920,228	546,040,905.48	952,961,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	977,384,000
107	GAUNG	BELANTARAYA	306,920,228	475,007,310.60	781,928,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	806,351,000
108	GAUNG	SUNGAI BARU	306,920,228	239,353,299.67	546,274,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	570,697,000
109	GAUNG	LAHANG TENGAH	306,920,228	240,807,370.33	547,728,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	572,151,000
110	GAUNG	LAHANG HULU	306,920,228	524,159,441.03	831,080,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	855,503,000
111	GAUNG	PUNGKAT	306,920,228	325,994,535.67	632,915,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	657,338,000
112	GAUNG	JERAMBANG	306,920,228	281,176,561.34	588,097,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	612,520,000
113	GAUNG	TELUK KABUNG	306,920,228	377,082,561.39	684,003,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	708,426,000
114	GAUNG	GEMBIRA	306,920,228	255,883,856.97	562,804,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	587,227,000
115	GAUNG	SEMAMBU KUNING	306,920,228	256,247,028.67	563,167,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	587,590,000
116	GAUNG	TELUK MERBAU	306,920,228	245,620,644.90	552,541,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	576,964,000
117	GAUNG	SOREN	306,920,228	236,259,639.50	543,180,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	567,603,000
118	GAUNG	PINTASAN	306,920,228	270,431,423.37	577,352,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	601,775,000
119	TEMBILAHAN HULU	PEKAN KAMIS	306,920,228	242,170,666.57	549,091,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	573,514,000
120	TEMBILAHAN HULU	PULAU PALAS	306,920,228	431,584,768.80	738,505,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	762,928,000
121	TEMBILAHAN HULU	SIALANG PANUANG	306,920,228	346,411,410.25	653,332,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	677,755,000
122	TEMBILAHAN HULU	SUNGAI INTAN	306,920,228	323,551,143.34	630,471,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	654,894,000
123	KEMUNING	BATU AMPAR	306,920,228	329,997,373.05	636,918,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	661,341,000
124	KEMUNING	KERITANG	306,920,228	588,731,756.41	895,652,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	920,075,000
125	KEMUNING	AIR BALUI	306,920,228	253,306,082.45	560,226,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	584,649,000
126	KEMUNING	TUK JIMUN	306,920,228	249,334,895.91	556,255,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	580,678,000
127	KEMUNING	KEMUNING TUA	306,920,228	203,047,869.03	509,968,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	534,391,000
128	KEMUNING	KEMUNING MUDA	306,920,228	221,131,574.81	528,052,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	552,475,000
129	KEMUNING	LIMAU MANIS	306,920,228	207,222,475.32	514,143,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	538,566,000
130	KEMUNING	LUBUK BESAR	306,920,228	196,240,983.24	503,161,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	527,584,000
131	KEMUNING	SEKARA	306,920,228	293,599,780.85	600,520,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	624,943,000
132	KEMUNING	TALANG JANGKANG	306,920,228	259,646,238.69	566,566,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	590,989,000
133	KEMUNING	SEKAYAN	306,920,228	226,042,771.12	532,963,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	557,386,000
134	PELANGIRAN	ROTAN SEMELUR	306,920,228	628,989,324.20	935,910,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	960,333,000
135	PELANGIRAN	SIMPANG KATEMAN	306,920,228	295,703,732.43	602,624,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	627,047,000
136	PELANGIRAN	TANJUNG SIMPANG	306,920,228	562,234,592.30	869,155,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	893,578,000
137	PELANGIRAN	BAUNG REJO JAYA	306,920,228	279,482,615.74	586,403,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	610,826,000
138	PELANGIRAN	TAGAGIRI TAMA JAYA	306,920,228	241,006,908.63	547,927,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	572,350,000
139	PELANGIRAN	PINANG JAYA	306,920,228	291,861,716.05	598,782,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	623,205,000
140	PELANGIRAN	WONOSARI	306,920,228	269,205,251.64	576,125,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	600,548,000
141	PELANGIRAN	TEGAL REJO	306,920,228	252,041,153.10	558,961,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	583,384,000
142	PELANGIRAN	INTAN MULIA JAYA	306,920,228	211,950,753.94	518,871,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	543,294,000
143	PELANGIRAN	SAKA PALAS JAYA	306,920,228	270,273,311.91	577,194,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	601,617,000
144	PELANGIRAN	CATUR KARYA	306,920,228	209,810,600.49	516,731,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	541,154,000
145	PELANGIRAN	BAGAN JAYA	306,920,228	222,496,314.36	529,417,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	553,840,000
146	PELANGIRAN	TELUK BUNIAN	306,920,228	353,276,365.26	660,197,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	684,620,000
147	PELANGIRAN	TERUSAN BERINGIN JAYA	306,920,228	269,079,817.29	576,000,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	600,423,000
148	PELANGIRAN	HIDAYAH	306,920,228	216,080,236.53	523,000,000.00	17,081,000.00</td		

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dana Desa			Pajak dan Retribusi		Total Keseluruhan
			Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa	Pajak	Retribusi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
153	TELUK BELENGKONG	BERINGIN MULIA	306,920,228	303,933,200.42	610,853,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	635,276,000
154	TELUK BELENGKONG	HIBRIDA JAYA	306,920,228	193,126,032.94	500,046,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	524,469,000
155	TELUK BELENGKONG	SUMBER JAYA	306,920,228	221,300,834.51	528,221,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	552,644,000
156	TELUK BELENGKONG	SUMBER MAKMUR JAYA	306,920,228	212,441,114.52	519,361,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	543,784,000
157	TELUK BELENGKONG	SUMBER SARI JAYA	306,920,228	243,112,443.09	550,033,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	574,456,000
158	TELUK BELENGKONG	KELAPA PATIH JAYA	306,920,228	319,767,525.96	626,688,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	651,111,000
159	TELUK BELENGKONG	SAPTA MULIA JAYA	306,920,228	236,250,284.28	543,171,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	567,594,000
160	TELUK BELENGKONG	SAKA ROTAN	306,920,228	369,556,062.93	676,476,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	700,899,000
161	TELUK BELENGKONG	GEMBARAN	306,920,228	372,051,319.72	678,972,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	703,395,000
162	PULAU BURUNG	PULAU BURUNG	306,920,228	626,652,699.91	933,573,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	957,996,000
163	PULAU BURUNG	TELUK NIBUNG	306,920,228	291,382,779.73	598,303,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	622,726,000
164	PULAU BURUNG	SUNGAI DANAI	306,920,228	289,945,661.56	596,867,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	621,790,000
165	PULAU BURUNG	MAYANG SARI JAYA	306,920,228	218,582,219.00	525,502,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	549,925,000
166	PULAU BURUNG	BUKIT SARI INTAN JAYA	306,920,228	233,213,414.43	540,134,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	564,557,000
167	PULAU BURUNG	MANUNGGAL JAYA	306,920,228	220,243,865.18	527,164,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	551,587,000
168	PULAU BURUNG	BANGUN HARJO JAYA	306,920,228	252,864,890.92	559,785,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	584,208,000
169	PULAU BURUNG	BERINGIN JAYA	306,920,228	199,043,491.78	505,964,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	530,387,000
170	PULAU BURUNG	SRI DANAI	306,920,228	217,239,183.66	524,159,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	548,582,000
171	PULAU BURUNG	SAPTA JAYA	306,920,228	236,499,770.86	543,420,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	567,843,000
172	PULAU BURUNG	KRAMAT JAYA	306,920,228	203,556,894.63	510,477,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	534,900,000
173	PULAU BURUNG	BINAGUN JAYA	306,920,228	199,368,330.66	506,289,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	530,712,000
174	PULAU BURUNG	SUKA JAYA	306,920,228	285,942,303.29	592,863,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	617,286,000
175	PULAU BURUNG	SUKAHARIO JAYA	306,920,228	225,894,023.07	532,814,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	557,237,000
	PULAU BURUNG	SEMPADAN JAYA						
176	CONCONG	CONCONG DALAM	306,920,228	257,152,576.15	564,073,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	588,496,000
177	CONCONG	CONCONG TENGAH	306,920,228	260,826,545.35	567,747,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	592,170,000
178	CONCONG	KAMPUNG BARU	306,920,228	299,614,329.62	606,535,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	630,958,000
179	CONCONG	PANGLIMA RAJA	306,920,228	256,144,433.68	563,065,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	587,488,000
180	CONCONG	SUNGAI BERAPIT	306,920,228	232,378,708.00	539,299,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	563,722,000
181	KEMPAS	PEKAN TUA	306,920,228	389,886,921.27	696,807,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	721,230,000
182	KEMPAS	RUMBIAJAYA	306,920,228	312,249,314.80	619,170,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	643,593,000
183	KEMPAS	BAYAS JAYA	306,920,228	320,458,680.15	627,379,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	651,802,000
184	KEMPAS	SUNGAI ARA	306,920,228	303,241,457.70	610,162,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	634,585,000
185	KEMPAS	SUNGAI GANTANG	306,920,228	377,093,492.26	684,014,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	708,437,000
186	KEMPAS	KARYA TANI	306,920,228	258,022,659.69	564,943,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	589,366,000
187	KEMPAS	KERTAJAYA	306,920,228	223,397,531.38	530,318,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	554,741,000
188	KEMPAS	KULUM JAYA	306,920,228	251,084,235.55	558,004,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	582,427,000
189	KEMPAS	DANAU PULAI INDAH	306,920,228	313,669,987.05	620,590,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	645,013,000
190	KEMPAS	SUNGAI RABIT	306,920,228	196,211,479.53	503,132,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	527,555,000
191	SUNGAI BATANG	BENTENG UTARA	306,920,228	312,498,870.36	619,419,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	643,842,000
192	SUNGAI BATANG	PASENGGERAHAN	306,920,228	257,073,306.47	563,994,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	588,417,000
193	SUNGAI BATANG	KUALA SUNGAI BATANG	306,920,228	207,630,734.48	514,551,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	538,974,000
194	SUNGAI BATANG	KUALA PATAH ARANG	306,920,228	358,850,203.10	665,770,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	690,193,000
195	SUNGAI BATANG	BENTENG BARAT	306,920,228	200,685,513.33	507,606,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	532,029,000
196	SUNGAI BATANG	PANDAN SARI	306,920,228	278,030,999.18	584,951,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	609,374,000
197	SUNGAI BATANG	MUGO MULYO	306,920,228	205,093,549.96	512,014,000.00	17,081,000.00	7,342,000.00	536,437,000
		Total	60,463,285,000	60,463,285,000	120,926,570,000.00	3,365,000,000.00	1,446,365,296.00	125,737,935,296.00

BUPATI INDRAGIRI HILIR

H. MUHAMMAD WARDAN